

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap daerah diberi wewenang untuk melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengingat saat ini penyusunan APBD sudah menjadi hak sepenuhnya bagi pemerintah daerah. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan tentang pemerintah daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menyatakan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, kewenangan lain yang diberikan kepada setiap daerah berupa penggunaan anggaran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus anggaran daerah tersebut dengan meminimalkan campur tangan pemerintah pusat dan melibatkan dua pihak yaitu eksekutif dan legislatif. Pemerintah daerah dalam upaya melaksanakan kegiatan atau program pelayanan kepada masyarakat tidak dapat melaksanakannya tanpa adanya anggaran. Anggaran merupakan alat untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan proses pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail mengenai pengeluaran pemerintah agar setiap perbelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada public.

Pengelolaan daerah sangat berpengaruh terhadap nasib suatu daerah. Pengelolaan daerah tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia namun juga sumber daya ekonomi yang berpa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah. Anggaran pemerintah daerah merupakan instrumen penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah, anggaran pemerintah daerah harus memuat kinerja untuk penilaian internal maupun untuk pertumbuhan ekonomi daerah tersebut (Hasanah & Vidiyastutik, 2018)

Proses pelaksanaan anggaran merupakan tahapan yang harus dilaksanakan setelah proses perencanaan anggaran. Proses perencanaan anggaran merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan semua kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan. Proses pelaksanaan anggaran terdiri dai internal unit kerja, dan juga



proses dari prosedur pembayaran. Kedua item ini mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran. (Dahana & Ermawati, 2020)

Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan salah satunya dengan menganalisa laporan penting pemerintah yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk mengukur kinerja keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.

Perhitungan rasio dalam mengukur kemampuan keuangan daerah berguna untuk menggambarkan kinerja Pemerintah Daerah. Pengukuran kinerja merupakan bagian penting dalam proses pengendalian manajemen, baik organisasi publik maupun swasta. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik, yaitu bukan hanya sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan dalam menunjukkan bahwa uang tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan efektif. (Awani & Hariani, 2021).

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah dibantu oleh perangkat daerah yang salah satunya adalah Sekretariat Daerah (Setda). Tugas pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon yaitu membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon merupakan unsur penunjang pemerintah kabupaten Cirebon. Sekretariat Daerah (Setda) dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Sekretaris daerah bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, sekretaris daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Sekretariat Daerah kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pemerintahan harus merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap program/kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas bahkan fungsinya untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih, untuk itu agar anggaran yang ditetapkan untuk membiayai semua kebutuhan program yang dijalankan serta realisasi dapat sesuai dengan anggaran yang



ditetapkan.

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja dari laporan realisasi anggaran (LRA) adalah Laporan ini menjadi salah satu laporan pertanggung jawaban pemerintahan daerah yang utama karena anggaran pemerintahana adalah tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran ini mempunyai peran penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. (Saragih dan Sari, 2018).

**Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran**

**Berikut ini adalah laporan realisasi anggaran belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2017-2021 :**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran Belanja Daerah</b>	<b>Realisasi Belanja Daerah</b>	<b>Presentase</b>
2017	64.163.317.282,00	57.287.399.052,00	89,28 %
2018	72.337.840.431,00	59.777.767.713,00	82,64 %
2019	70.013.056.896,00	64.840.242.028,00	92,61 %
2020	59.189.208.455,00	54.482.527.131,00	92,05 %
2021	56.474.107.832,00	52.418.123.565,00	92,82 %

**Sumber :Laporan Realisasi Anggaran ( data diolah )**

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa besarnya belanja daerah yang dibuat pemerintah daerah Kabupaten Cirebon tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam perwujudan akuntabilitas dan transparansi belanja daerah, juga dalam urusan mengatur dan penyampaian laporan keuangan yang penyusunannya atas dasar standar akuntansi pemerintahan dan mencapai prinsip ketepatan waktu (Sari, 2018)

Dengan mengetahui perbandingan hasil target anggaran dan realisasi penerimaan daerah, maka tingkat efektivitas pengelolaan keuangan pada kantor



Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon diberikan penilaian dengan menggunakan kriteria penilaian berdasarkan Kepmendagri No.690/900/327 Tahun 1994 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Kriteria Efektifitas**

<b>Presentase</b>	<b>Kriteria</b>
100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektivitas
<60%	Tidak Efektivitas

**Sumber : Kepmendagri No.690/900/327 Tahun 1994**

Menurut Mardiasmo (2013, hal 105) “organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan”.

**Tabel 1.3 Kriteria Efisiensi**

<b>Presentase</b>	<b>Kriteria</b>
Diatas 100%	Tidak Efisiensi
90-100%	Kurang Efisiensi
80-90%	Cukup Efisien
60-80%	Efisiensi
<60%	Sangat Efisiensi

**Sumber : Kepmendagri No.690/900/327 Tahun 1996**



Pada tabel dibawah ini merupakan kriteria penilaian varians belanja yaitu sebagai berikut (Purwaningsih, 2021) :

**Tabel 1.4 Kriteria Varians Belanja**

Kriteria Varians Belanja	Ukuran
Baik	Realisasi Belanja < Anggaran Belanja
Kurang Baik	Realisasi Belanja > Anggaran Belanja

**Sumber : (Purwaningsih, 2021)**

Berdasarkan pertumbuhan realisasi belanja baik berupa kenaikan atau penurunan, maka dibawah ini merupakan kriteria peniliannya yaitu sebagai berikut (Mahmudi, 2016):

**Tabel Kriteria 1.5 Penilaian Kinerja Pertumbuhan Belanja**

Kriteria	Ukuran
Naik	Positif
Turun	Negatif

**Sumber : (Mahmudi, 2016)**

Adapun kriteria untuk pengukuran berdasarkan Analisis Keserasian merupakan perbandingan antara total belanja modal dengan total belanja. Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Pada umumnya standar pengukuran belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5-20 persen. (Mahmudi,2010).

Dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan hal penting dalam sector public karena merupakan planning dalam membuat kegiatan serta biaya yang diperlukan dalam 1 tahun yang akan datang dan juga akan menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah serta pelaksanaan pembangunan di daerah Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal itu disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik (publik fund) melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan



semestinya, efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Belanja daerah tersebut juga mencerminkan kebijakan menghasilkan pendapatan merupakan suatu hal yang lebih sulit dibandingkan membelanjakan. Kaeran sifat belanja yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran, maka perencanaan, pengendalian dan pengewasan terhadap belanja sangat penting dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasarevaluasi, koreksi dan perbaikan ke depan. (Mahmudi, 2010).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dengan judul :

**“Analisis Kinerja Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2017-2021”.**

#### **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka Identifikasi Masalah adalah:

1. Perkembangan kinerja belanja pemerintah daerah pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017-2021.
2. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkait dengan kinerja dari pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara baik.

#### **C. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah perkembangan kinerja keuangan belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dilihat dari rasio varians tahun anggaran 2017 s/d 2021 ?
2. Bagaimanakah perkembangan kinerja keuangan belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dilihat dari rasio Efisiensi tahun anggaran 2017 s/d 2021?
3. Bagaimanakah perkembangan kinerja keuangan belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon



dilihat dari rasio Efektivitas tahun anggaran 2017 s/d 2021 ?

4. Bagaimanakah perkembangan kinerja keuangan belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dilihat dari rasio Pertumbuhan tahun anggaran 2017 s/d 2021?
- d. Bagaimana keserasian realisasi pengguna anggaran belanja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2017-2021?

#### **D. BATASAN MASALAH**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Batasan masalah dalam penelitian ini hanya meliputi Analisis Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017-2021. Untuk mengukur kinerja belanja daerah peneliti menggunakan rasio varians, rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian untuk melihat penyebab belanja mengalami peningkatan.

#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

##### **Tujuan Penelitian :**

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kinerja anggaran belanja daerah dilihat dari analisis varians belanja.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah kinerja anggaran belanja daerah dilihat dari analisis rasio efisiensi.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah kinerja anggaran belanja daerah dilihat dari analisis rasio efektivitas.
4. Untuk mengetahui bagaimanakah kinerja anggaran belanja daerah dilihat dari analisis rasio pertumbuhan.
5. Untuk mengetahui bagaimanakah kinerja anggaran belanja daerah dilihat dari keserasian belanja.



## **E. MANFAAT PENELITIAN**

### **Manfaat Penelitian :**

#### 1. Bagi penulis

Untuk menambah dan memperluas wawasan penulis khususnya mengenai Analisis Kinerja Anggaran Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

#### 2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai informasi tambahan referensi dalam menganalisis kinerja anggaran belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

#### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau referensi bagi penulis selanjutnya, khususnya mengenai analisis kinerja anggaran belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan yaitu rangkaian pembahasan mencakup dalam isi penelitian, yang mana satu dengan yang lain saling berkaitan dan berhubungan sebagai satu kesatuan yang utuh yang merupakan urutan dari setiap bab, maka penulis menyusun skripsi ini ke dalam bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-sub yang saling berkaitan. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi, penulis menguraikan mengenai latar belakang permasalahan pada analisis belanja daerah dalam laporan realisasi anggaran pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis serta sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini membahas mengenai penjabaran teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu teori mengenai analisis kinerja belanja daerah pada laporan realisasi anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2017-2021.

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai gambaran umum Kantor Sekretariat



Daerah Kabupaten Cirebon, Visi dan Misi Setda, Tugas Subbagian Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon serta struktur organisasi Kantor Setda Kabupaten Cirebon.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang penguraian hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2017-2021

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi pernyataan singkat berupa kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas dan saran untuk pemanfaatan penelitian dimasa mendatang dan masukan bagi pihak terkait. Serta penutup dimana pada bagian ini terdiri dari kesimpulan yang didapat dari hasil akhir penelitian dan saran bagi pembaca.

